

## Kapitalisme Dalam Dunia Politik Dan Demokrasi

**Mustakim**

IAI An-Nadwah Kuala Tungkal, Indonesia

Email: [mustakim@an-nadwah.ac.id](mailto:mustakim@an-nadwah.ac.id)

### Abstrak

Artikel ini menggunakan pendekatan *literature review* mencoba untuk menggambarkan terjadinya kapitalisme dalam dunia politik dan demokrasi, dengan melihat aspek apa itu kapitalisme dan akibat yang dihasilkannya dalam dunia politik-demokrasi saat ini, serta perlunya kemandirian/ keterlepasan masyarakat dari politik uang yang disebabkan oleh kapitalisme ekonomi menuju masyarakat mandiri meskipun hidup ditengah himpitan ekonomi yang berbasis kapitalis.

**Kata Kunci:** Kapitalisme; Politik; Demokrasi; Ekonomi

### PENDAHULUAN

Dalam dunia kapitalis kepemilikan individu dilindungi hukum formal sehingga tercipta kelas-kelas sosial, yakni kelas sosial yang menguasai faktor produksi dan kelas sosial yang tidak menguasai faktor produksi.<sup>1</sup> dari sini kita bisa melihat bahwa orang-orang yang menguasai faktor produksi pastilah memiliki kekuatan dan daya beli yang lebih tinggi dan memiliki kedudukan/ pengaruh lebih tinggi ditengah-tengah masyarakat, sudah mesti peluang terpilih yang lebih besar dalam pemilihan umum.

Meskipun hal tersebut tidak serta merta dapat terjadi seperti demikian, karena masyarakat pada hakikatnya memiliki kebebasannya sendiri dalam memilih dalam pemilihan umum. Masyarakat harus mampu berdiskusi dan memilih sesuai pilihannya dalam setiap sendi-sendi kehidupan (dari sosial, ekonomi dan tidak terlepas kehidupan politiknya dalam pemilu).<sup>2</sup>

Salah satu langkah awal dalam revolusi politik ini adalah memperbaiki sistem pemilu. Hal ini perlu perubahan yang representatif, dan perhitungan suara yang lebih adil, dan perlunya aturan yang ketat tentang politik uang dan korupsi dalam rangka

---

<sup>1</sup> Firmansyah Firmansyah and Firmansyah Firmansyah, 'Menghadapi Kapitalisme Dalam Konteks Hukum Indonesia', *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, 7.1 (2022), pp. 28–36, doi:10.24256/alw.v7i1.2609.

<sup>2</sup> Ainur Rochmaniah, *Buku Ajar Corporate Sosial Responsibility Dan Community Development*, Buku Ajar Corporate Sosial Responsibility Dan Community Development, 2020, doi:10.21070/2020/978-623-6833-77-3.

pengembalian kepercayaan rakyat terhadap pemilu. Selain revolusi politik perlu pula peningkatan partisipasi masyarakat dan masyarakat harus diberikan ruang yang luas untuk menentukan pilihannya tanpa intervensi dalam berbagai bentuk dan peningkatan partisipasi dalam berbagai bidang.<sup>3</sup>

Direktur eksekutif indikator politik indonesia burhanuddin muhtadi mencatat ada 35 persen responden yang menentukan pilihannya karena uang di pemilu 2024. Pada pemilu 2019, kelompok pemilih ini hanya 28 persen. "pemilih oportunistik menurun tapi pemilih transaksional atau pemilih wani piro meningkat," kata burhanuddin dalam konferensi pers secara daring, Rabu, 21 Februari 2024. Dalam survei indikator yang dilakukan usai pencoblosan, Rabu, 14 Februari 2024, jumlah masyarakat yang menganggap politik uang tidak wajar, menurun. Artinya, jumlah masyarakat menilai politik uang hal yang wajar meningkat. "yang mengatakan politik uang tidak wajar dilakukan oleh calon anggota legislatif (caleg), tim sukses (timses), dan lainnya di 2019 (sebesar) 67 persen sekarang tinggal 49,6 persen," ujar jelasnya.<sup>4</sup>

Dari fenomena tersebut bahwa pembahasan tentang kapitalisasi dalam politik cukup menarik untuk diperbincangkan, dimana kita menemukan adanya faktor budaya permisif pada praktek politik uang dalam pemilu.

### METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan metode studi literatur (*literature review*), yaitu teknik pengumpulan data dengan menelaah sumber-sumber tertulis yang meliputi berita daring, buku, dan jurnal ilmiah yang relevan dengan topik penelitian. Dengan melalui proses penentuan topik, penelusuran sumber, pengumpulan data, selanjutnya dianalisis dan publis (dituliskan).<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> <https://unand.ac.id/berita/opini/1300-pemilu-revolusi-sistem-politik-indonesia>

<sup>4</sup> M Uhaib A'as, 'Kapitalisasi Demokrasi Dan Jaringan Patronase Politik: Keterlibatan Pengusaha Tambang Dalam Pilkada Di Kalimantan Selatan', *Jurnal As Siyasa*, 1.1 (2016), pp. 34–41.

<sup>5</sup> Afifah Ansori and Martoyo, 'Mencari Tambah Ilmu', *Pengertian: Jurnal Pendidikan Indonesia (PJPI)*, 2.1 (2024), pp. 137–44.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Kapitalisme dan Akibat yang Dilahirkan

Apa itu kapitalis dan bagaimana sejarahnya, kapitalisme berawal dari gerakan pembebasan dari absolutisme monarki penguasa bangsawan dan geraja saat itu untuk memberikan kebebasan (liberalisme), dan kapitalisme juga melahirkan semangat negara bangsa (kemerdekaan negara jajahan, berdiri diatas entitas/bangsa mereka sendiri) dan kapitalisme sebagaimana disebutkan diatas bahwa juga terinspirasi dari perlawanan otoritas agama/gereja saat itu dan kerejaan yang absolut. Dan dari kapitalisem melahirkan isme-isme (liberalisme-individualisme-materialisme-hedonisme-dan sekularisme) merupakan satu paket dalam ideologi kapitalisme, dan sejak abad 18 isme kapitalisme telah berjaya dan berkuasa diatas isme-isme lainnya didunia saat ini.<sup>6</sup> Apa saja yang terjadi dengan praktek kapitalisme tersebut, diantara:

1. Kapitalisme menguatkan individualisme (semangat kebebasan/ hak individu) dan pada akhirnya hilangnya jiwa sosial.<sup>7</sup>
2. Dalam sistem ekonomi kapitalis, selain pajak, kapitalisme tidak terlepas dari sistem bunga bank yang pula menjadi instrumen vitalnya.<sup>8</sup> kapitalisme melahirkan bunga dan sistem bunga melahirkan ketimpangan ekonomi/ distribusi.<sup>9</sup>
3. Dalam kapitalisme ekonomi akan terjadi ketimpangan distribusi, didamana hanya orang-orang yang memiliki faktor produksi (kaya terus kaya dan miskin terus saja miskin),<sup>10</sup> dan dalam konteks negara (negara akan dzalim pada rakyatnya) dalam dunia hukum (terjadi tebang pilih) dan dalam politik (hanya yang punya uang saja yang bisa menang).
4. Dalam dunia kapitalis pula ada yang namanya spekulator/ spekulasi, hal terjadi karena penyeimbangan antara naik turunnya suku bunga dan pajak, maka spekulasi harus dilakukan dalam dunia kapitalis dan sudah mesti para spekulator akan selalu mementingkan dirinya sendiri walaupun itu buruk bagi orang lain, karena memang kapitalisme itu sangat individualisme.

---

<sup>6</sup> Mustakim, 'Kapitalisma, Sejarah Dan Nilai/Ciri/Karakternya (Dari Liberalisme Hingga Sekularisme)', *Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah*, 5.03 (2022), pp. 56–62.

<sup>7</sup> Mustakim Mustakim and Heru Setiawan, 'Keistimewaan Fiqh Muamalah/Sistem Ekonomi Islam Dengan Sistem Ekonomi Lainnya', *Jurnal Ekonomi Syariah*, 2.Desember (2019), p. 79.

<sup>8</sup> 'Www.Ejournal.an-Nadwah.Ac.Id Page | 10', 2023, pp. 10–17.

<sup>9</sup> 'Www.Ejournal.an-Nadwah.Ac.Id Page | 10'.

<sup>10</sup> Mustakim, 'Dasar Hukum Dan Filosofi Distribusi Dalam Ekonomi Islam', *Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2.1 (2019), pp. 68–87.

5. Dalam dunia kapitalis terjadipula yang namanya inflasi yang disebabkan oleh sistem bunga dan pajak diatas, dengan inflasi tersebut akan menyusahkan masyarakat terutama dalam perekonomian.<sup>11</sup>
6. Sebab dari inflasi diatas diataranya adalah naiknya harga-harga. Harga tersebut akan mempengaruhi daya beli masyarakat/ konsumsi masyarakat, dan ketika menurunnya daya beli disisilain pula terjadi kerugian bagi para pedagang (yang mengalami penurunan penjualan).<sup>12</sup>

Dari ilustrasi diatas bahwa memang tidak dapat dipungkiri, bahwa kapitalisme memiliki andil besar dalam memberikan kebebasan individu untuk berusaha dan berkembang, namun kerap kali melupakan aspek sosial/ distribusi/ keadilan ekonomi, hal tersebut disebabkan oleh sistem bunga-pajak, dimana hanya para spekulator yang bisa menang dalam persaingan, dan hal tersebut tidak luput pula melahirkan inflasi dan naiknya harga-harga, sehingga masyarakat yang tidak mampu bersaing akan mengalami kesusahan dalam hidupnya dan akan memamiliki daya tawar yang lebih rendah dalam pemilu pada khususnya.

### **B. Kapitalisme dan Demokrasi Saat Ini Serta Arah Perbaikan**

Dari beberapa penelusuran ada beberapa hal yang terungkap mengenai praktik kapitalisme dalam dunia demokrasi saat ini, diantaranya:

1. Kapitalisme menjadi urat nadi demokrasi saat ini, dan dapat kita lihat para kapitalisme oligarki terjun atau melakukan hubungan dengan kegiatan demokrasi kita. Sebahagian besar pejabat terpilih melalui pemilu melakukan cara-cara kapitalis.<sup>13</sup>
2. Pemilu 2024 yang telah lalu menjadi momentum untuk memperkuat demokrasi yang cenderung melemah dalam beberapa tahun terakhir dimana perlaku politik justru malah sebaliknya.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> Mustakim, Shintya Sari Terisna, and Siti Maimunah, 'Analisis Pemikiran Individu Mengenai Dampak Positif Dan Negatif Inflasi Terhadap Pendapatan Pribadi', *Al-Mizan : Jurnal Ekonomi Syariah*, 2023, pp. 1–22.

<sup>12</sup> Mustakim and Nur Hilda Yanti, 'Analisis Pengaruh Kenaikan Harga Cabai Terhadap Konsumsi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umk) Di Kuala Tungkal', *Al-Mizan : Jurnal Ekonomi Syariah*, 5 (2022), pp. 39–49.

<sup>13</sup> <https://indoprogress.com/2024/05/tren-illiberal-kian-kuat-di-era-prabowo/>

<sup>14</sup> <https://www.kompas.id/baca/riset/2024/01/16/pemilu-2024-dan-pertaruhan-demokrasi-indonesia>

3. Meluasnya marketing politi dan money politik (politik menggunakan uang), politik pencitraan, memudarnya kekuatan ideologi politik-demokrasi, dan politik elit, dan perilaku a-politik sebagai bentuk budaya politik rabun ayam.
4. Eksploitasi pada masyarakat kelas pekerja dan rakyat miskin terus terjadi dan dilestarikan oleh pemerintah yang terus mendukung kelas kapitalis melalui sistemnya yang lebih menguntungkan bagi kelompok kapitalis dan sebaliknya pada kelompok pekerja.<sup>15</sup>
5. Dalam dunia demokrasi saat ini, muncul pertanyaan-pertanyaan, apakah pilkada benar-benar mencerminkan semangat demokrasi, atau sekedar panggung kapitalisasi politik? Mungkin terdengar sinis, tapi hal ini berhadapan dengan realitas money politik, besarnya kekuatan oligarki dan bisnis dalam pendanaan kampanye.<sup>16</sup>
6. Kapitalisasi politik yang sudah mengurita dalam setiap pelaksanaan pemilu di indonesia jelas bertentang dengan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatauan, keadilan sosial serta nilai nilai musyawarah mufakat itu sendiri.<sup>17</sup>
7. Kecurangan-kecurangan pemilu terjadi pada politik uang pada saat kampanye, dan adapula ketidak netralan aparaturan sipil negara (didalam pemberian dukungan yang tersembunyi/ secara tidak langsung), dan krisis transparansi terhadap laporan-laporan kecurangan pemilu.<sup>18</sup>
8. Demokrasi di indonesia terganggu oleh maraknya kapitalisasi dalam pelaksanaan pemilu. Untuk itu perlunya pendidikan/ pembelajaran politik yang baik disekolah-sekolah dan pemerintahan tidak luput pula di lingkungan partai politik, agar kapitalisasi pemilu bisa teratasi.<sup>19</sup>

Dari ilustrasi tersebut terungkap adanya praktek kapitalisme dalam demokrasi, padahal hal tersebut bertentang dengan nilai-nilai luhur bang sa indonesia dan perlu adanya pembenahan dalam sistem pemilu kita agar tidak terpapar kapitalisme, meskipun disisi lain dalam dunia ekonomi kapitalisme sudah mendarang daging.

---

<sup>15</sup> <https://indoprogress.com/2024/05/prabowo-dan-kediktatoran-kapital/>

<sup>16</sup> <https://bangka.tribunnews.com/2024/11/23/pilkada-2024-demokrasi-atau-kapitalisasi-politik>.

<sup>17</sup> Sudirman Sudirman and Ade Kurnia, 'Kapitalisasi Politik Dalam Pelaksanaan Pemilu Sebagai Praktek Yang Menciderai Hakekat Nilai Demokrasi Pancasila', *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 12.02 (2022), pp. 92–106.

<sup>18</sup> Adnan Said Alghan and others, 'Kecurangan Pemilihan Presiden Di Indonesia Pada Tahun 2024 : Analisis Kasus Dan Dampaknya Terhadap Demokrasi', 24.10 (2025), pp. 514–20.

<sup>19</sup> <https://bandungbergerak.id/article/detail/1597334/mahasiswa-bersuara-demokrasi-di-bawah-bayang-bayang-kapitalisme-dampak-uang-dan-kekuasaan-pada-pemilu>

Tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat kita saat ini adalah masyarakat yang persepsinya terganggu/ pemahaman perceptual selection,<sup>20</sup> atau pemahaman yang tidak sempurna terhadap suatu hal, dalam perceptual selection terjadi pemahaman yang yang tertumpu pada hal-hal kecil yang dominan menurut dia (dalam hal pemilu dipengaruhi politik uang), yang disebabkan sistem ekonomi yang tidak adil (harga-harga naik yang menimbulkan ketimpangan, dan ketidak mampuan masyarakat memenuhi kebutuhan hidupnya). Kemandirian dan berdikari sangat penting untuk memicu perkembangan usaha dalam berbagai bentuk, agar tercipta daya beli yang kuat dan mengurangi ketimpangan sosial ditengah-tengah masyarakat.<sup>21</sup>

Untuk mengontrol praktek politik uang dalam pemilu, maka ada beberapa langkah yang dapat dilakukan diantaranya: (a) penyempurnaan aturan-aturan pemilu (b) membentuk penegak hukum yang berintegritas dan (c) masyarakat harus menjadi masyarakat yang kritis dan partisipatif dalam rangka mewujudkan pemilu yang jujur dan adil, karena tanpa daya kritis dan partisipasi masyarakat aturan pemilu yang baik dan KPU sebagai penyelenggara pemilu yang netral dan profesional tidak akan efektif.<sup>22</sup>

### KESIMPULAN

Kapitalisme telah mengurita dan menjadi urat nadi demokrasi/ politik saat ini, untuk itu perlunya pendidikan/ pembelajaran politik, serta yang paling utama masyarakat harus berdikari diatas kakinya sendiri untuk memilih dan menentukan masa depan bangsa ini, tanpa harus terpengaruh politik uang, meskipun sedang dalam kondisi terhimpit secara ekonomi.

### REFERENSI

a'as, m uhaib, 'kapitalisasi demokrasi dan jaringan patronase politik: keterlibatan pengusaha tambang dalam pilkada di kalimantan selatan', *jurnal as siyasah*, 1.1 (2016), pp. 34–41

Alghan, adnan said, fadlan hafiedh, marvel louis, virghikal birru, and unggul pratama,

---

<sup>20</sup> Pada Bank Syariah, 'Www.Ejournal.an-Nadwah.Ac.Id. Page | 71', 4.Juli 2021, pp. 71–79.

<sup>21</sup> Fungsi Konsumsi and others, 'Al – Amal : Jurnal Manajemen Bisnis Syariah e- ISSN: 2798-8694, p- ISSN: 2807-128X', 3.Juli (2023), pp. 22–29.

<sup>22</sup> Galuh Kartiko, 'Sistem Pemilu Dalam Perspektif Demokrasi Di Indonesia', *Jurnal Konstitusi*, II.No.1 (2009), pp. 1–171.

- ‘kecurangan pemilihan presiden di indonesia pada tahun 2024 : analisis kasus dan dampaknya terhadap demokrasi’, 24.10 (2025), pp. 514–20
- Ansori, afifah, and martoyo, ‘mencari tambah ilmu’, *pengertian: jurnal pendidikan indonesia (pjpi)*, 2.1 (2024), pp. 137–44
- Firmansyah, firmansyah, and firmansyah firmasyah, ‘menghadapi kapitalisme dalam konteks hukum indonesia’, *al-amwal : journal of islamic economic law*, 7.1 (2022), pp. 28–36, doi:10.24256/alw.v7i1.2609
- Kartiko, galuh, ‘sistem pemilu dalam perspektif demokrasi di indonesia’, *jurnal konstitusi*, ii.no.1 (2009), pp. 1–171
- Konsumsi, fungsi, dalam kerangka, kerja islam, yang mengkaitkan tabungan, pertumbuhan dan, and pemerataan pendapatan, ‘al – amal : jurnal manajemen bisnis syariah e- issn: 2798-8694, p-issn: 2807-128x’, 3.juli (2023), pp. 22–29
- Mustakim, ‘dasar hukum dan filosofi distribusi dalam ekonomi islam’, *al-mizan: jurnal ekonomi syariah*, 2.1 (2019), pp. 68–87
- , ‘kapitalisma, sejarah dan nilai/ciri/karakternya (dari liberalisme hingga sekularisme)’, *al-mizan: jurnal ekonomi syariah*, 5.03 (2022), pp. 56–62
- Mustakim, mustakim, and heru setiawan, ‘keistimewaan fiqh muamalah/sistem ekonomi islam dengan sistem ekonomi lainnya’, *jurnal ekonomi syariah*, 2.desember (2019), p. 79
- Mustakim, shintya sari terisna, and siti maimunah, ‘analisis pemikiran individu mengenai dampak positif dan negatif inflasi terhadap pendapatan pribadi’, *al-mizan : jurnal ekonomi syariah*, 2023, pp. 1–22
- Mustakim, and nur hilda yanti, ‘analisis pengaruh kenaikan harga cabai terhadap konsumsi usaha mikro kecil dan menengah (umkm) di kuala tungkal’, *al-mizan : jurnal ekonomi syariah*, 5 (2022), pp. 39–49
- Rochmaniah, ainur, *buku ajar corporate sosial responsibility dan community development, buku ajar corporate sosial responsibility dan community development*, 2020, doi:10.21070/2020/978-623-6833-77-3
- Sudirman, sudirman, and ade kurnia, ‘kapitalisasi politik dalam pelaksanaan pemilu sebagai praktek yang menciderai hakekat nilai demokrasi pancasila’, *jurnal pendidikan kewarganegaraan*, 12.02 (2022), pp. 92–106
- Syariah, pada bank, ‘www.ejournal.an-nadwah.ac.id. Page | 71’, 4.juli 2021, pp. 71–79

‘[www.ejournal.an-nadwah.ac.id](http://www.ejournal.an-nadwah.ac.id) page | 10’, 2023, pp. 10–17